

HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI V BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

Ketua Sidang : HENDAH SUNUGROHO (Dishub Propinsi DKI Jakarta)
Sekretaris : DJAMAL SUBASTIAN (Kasubdit Angkutan Massal, Dit. BSTP)
Narasumber : SURIPNO (Direktur BSTP)
 JUDIZA R. ZAHIR (Kasubdit Manajemen Lalu Lintas, Dit. BSTP)
Notulen : J.E. WAHYUNINGRUM
 TATAN RUSTANDI
Tim Perumus : Dishub Kota Semarang
 J.E. WAHYUNINGRUM
 TATAN RUSTANDI

I. PENDAHULUAN

Sidang Komisi V membahas materi dari Bidang Transportasi Perkotaan yang meliputi 2 (dua) butir substansi berkaitan dengan tema rakornis yang menyangkut peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan jasa transportasi, yaitu :

- Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum
- Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil pembahasan disepakati tidak ada perubahan pada substansi bahasan.

II. HASIL PERUMUSAN

A. Materi Bahasan

Materi Sidang Komisi V Bidang Transportasi Perkotaan meliputi:

1. Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum
2. Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas.

B. Hasil Pembahasan

1. Peningkatan penggunaan angkutan umum

Tanggapan : Pada dasarnya anggota Komisi V setuju dalam pengembangan pelayanan angkutan umum yang nyaman, tepat waktu dan terjangkau, bersifat massal, serta pengelolaan yang lebih profesional. Hal ini perlu ditunjang dengan beberapa kebijakan pendukung dari pemerintah, misalnya: pemberian subsidi bagi pengoperasian angkutan umum; pemberian insentif

investasi pada operator yang akan meningkatkan kualitas pelayanannya (bebas bea masuk, kemudahan spare parts, dsb).

Tindak lanjut :

- Pemerintah Pusat
 1. Revisi peraturan perundangan
 2. Menyusun SPM angkutan umum di wilayah perkotaan
 3. Pembinaan teknis penerapan SPM
 4. Memberikan pembinaan teknis & fasilitasi penyediaan sarana angkutan massal.

- Pemerintah Daerah
 1. Revisi Perda angkutan umum
 2. Penataan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan umum sesuai SPM
 3. Pengenalan subsidi angkutan umum sebagai wacana dalam peningkatan pelayanan angkutan umum
 4. Penerapan persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek
 5. Menginventarisasi koridor - koridor utama untuk angkutan massal
 6. Desain rinci lintasan angkutan umum massal
 7. Membangun sarana, prasarana dan fasilitas - fasilitas angkutan umum massal

2. Mengurangi kemacetan lalu lintas

Tanggapan : Pada dasarnya anggota komisi V setuju dengan materi yang tertuang dalam bahasan `Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas` dengan :

- Memperketat persyaratan kepemilikan kendaraan pribadi
- Membatasi penggunaan kendaraan pribadi
- Mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor sesuai karakter daerah masing-masing
- Mendorong pengembangan bus/angkutan karyawan.

Tindak lanjut :

- Pemerintah Pusat :
 1. Revisi peraturan perundang – undangan
 2. Menerbitkan Pedoman Teknis
 3. Melakukan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pedoman Teknis

4. Memberikan Pembinaan Teknis dan Fasilitasi bagi Pengembangan Kawasan-kawasan Percontohan

- Pemerintah Daerah :
 1. Menyusun Perda pelaksanaan di bidang lalu lintas
 2. Menyusun Perda penetapan pajak progresif kendaraan bermotor
 3. Menyusun Perda Penataan Kawasan dan Tarif Parkir
 4. Mengembangkan pelayanan angkutan karyawan
 5. Menerapkan kawasan percontohan pengaturan lalu lintas kendaraan tidak bermotor (misal: pedestrianisasi)
 6. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki melalui pemberlakuan sanksi terhadap penyalahgunaan fungsi fasilitas dimaksud.

III. PENUTUP

Demikian hasil perumusan sidang Komisi V Bidang Transportasi Perkotaan untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Jogjakarta, 23 November 2005

Komisi V Bidang Transportasi Perkotaan

HENDAH SUNUGROHO :
Ketua

DJAMAL SUBASTIAN :
Sekretaris

Komisi V Bidang Transportasi Perkotaan

Peserta :

1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga
9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Langkat
10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hulu
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi
16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sawah Lunto
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang Hari
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi
23. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
24. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau
25. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lahat
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitang
29. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang
30. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
31. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
32. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ciamis
34. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung
35. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar
36. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
37. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
38. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi
39. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
40. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
41. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
42. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

43. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
44. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
45. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga
46. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang
47. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta
48. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Kidul
51. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
52. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
53. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
54. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
55. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malang
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mojokerto
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Badung
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangli
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buleleng
63. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
64. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram
65. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai
67. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang
68. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Utara
70. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong
72. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palngkaraya
73. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
74. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda
75. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon
76. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo
77. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
78. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar
79. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Selatan
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Satal
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Selatan
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boalemo
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gorontalo

89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pahuwato
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bone Bolango
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buol
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Morowali
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bone
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gowa
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Soppeng
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tana Toraja
99. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Gorontalo
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bima
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Flores
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. halmahera
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara Barat
104. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak fak
106. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
107. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jaya Pura
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Utara
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manokwari
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jaya Pura
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jaya Wijaya
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merauke
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paniai
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Cendrawasih
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yapen waropen
118. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima